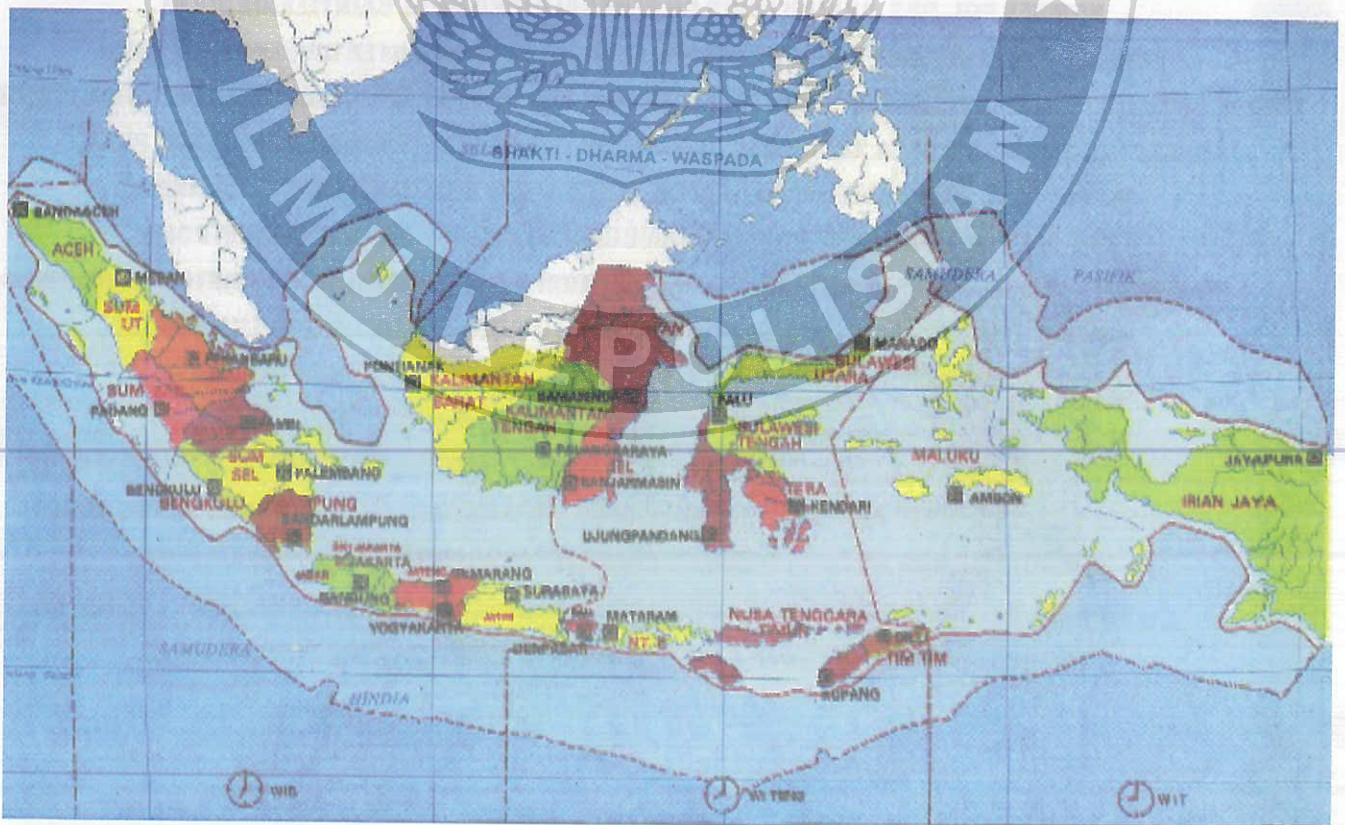


# MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN



OLEH: KOL INF DODY USODO  
HARGO.S,S.IP

Ketahanan nasional suatu negara ditentukan oleh keuletan dan ketangguhannya mengatasi berbagai macam tantangan, ancaman hambatan dan gangguan dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Perkembangan lingkungan strategis pada tataran regional saat ini, menempatkan masalah perbatasan sebagai hal yang krusial dan berpotensi besar menimbulkan konflik antar negara yang wilayahnya berbatasan langsung. Kondisi ini bila dibiarkan terus berlarut akan menimbulkan pengaruh yang negatif bagi kehidupan sosial masyarakat yang berada di wilayah tersebut, karena masalah perbatasan dapat disebabkan oleh perebutan sumber daya alam, pelintas batas penduduk tradisional, lalu lintas barang-barang selundupan maupun tempat pelarian para pelaku pelanggaran hukum. Begitu pula, banyaknya pulau-pulau yang berserakan disepanjang suatu wilayah yang tidak dihuni dan belum punya nama, dapat mengundang klaim dari negara lain dan bermuara dengan timbulnya konflik antar negara.





# RAKAT DI WILAYAH PERBATASAN NKRI AMAN DAN KESEJAHTERAAN

**I**NDONESIA sebagai negara kepulauan berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara lainnya di darat dan lautun. Secara khusus berbatasan secara langsung di darat dengan 3 (tiga) negara tetangga yaitu Malaysia di Kalimantan, Papua Neu Guinea (PNG) di Papua dan Republica Democratica Timor Leste (RDTL) di daratan Timor. Dalam pembahasan ini akan lebih dititik beratkan pada wilayah perbatasan darat NKRI dengan negara tetangga. Wilayah Indonesia yang berbatasan secara langsung di darat dengan negara tetangga adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan RDTL, Provinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Timur dengan Negeri Sabah Malaysia dan Provinsi Papua dengan PNG. Dengan demikian Provinsi tersebut merupakan garis terdepan dalam pertahanan negara, namun demikian wilayah perbatasan tersebut masih memiliki beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi ketangguhan Ketahanan Nasional, khususnya Ketahanan Sosial yang berkaitan dengan lingkungan kemasyarakatan di perbatasan.

Masalah Ketahanan Sosial di wilayah perbatasan dewasa ini perlu mendapat perhatian secara khusus dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sejalan dengan terjadinya perubahan yang cepat di kawasan tersebut akibat pengaruh perkembangan lingkungan strategis (global, regional dan nasional). Masalah sosial itu sendiri di ketahui tidak semata-mata terkait dengan adanya ancaman yang datang dari luar suatu negara, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari masalah yang timbul dari dalam masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Dengan kondisi pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang pada umumnya masih rendah dan pelayanan hukum serta kesehatan yang belum optimal



sehingga sangat mudah pihak luar untuk mempengaruhi/mengintimidasi penduduk dengan cara menghasut, menyebarkan isu-isu/opini negatif yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Masalah-masalah yang terkait dengan perbatasan antar negara menjadi hal yang sensitif dan memudahkan terjadinya perselisihan serta konflik dimasa depan.

Dari latar belakang pemikiran dan identifikasi permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah: Bagaimana membangun Ketahanan Sosial masyarakat di wilayah perbatasan NKRI guna meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ?

## PEMBAHASAN

Wilayah perbatasan darat NKRI dengan negara-negara tetangga tersebut meliputi wilayah kecamatan dan atau wilayah Kabupaten/ Kota yang secara geografis dan demografis berbatasan secara langsung. Secara garis besar wilayah perbatasan tersebut terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan budi daya serta taman nasional sehingga sangat memungkinkan menimbulkan masalah di bidang Ketahanan Sosial dalam tinjauan beberapa aspek yang terkait sebagai berikut :

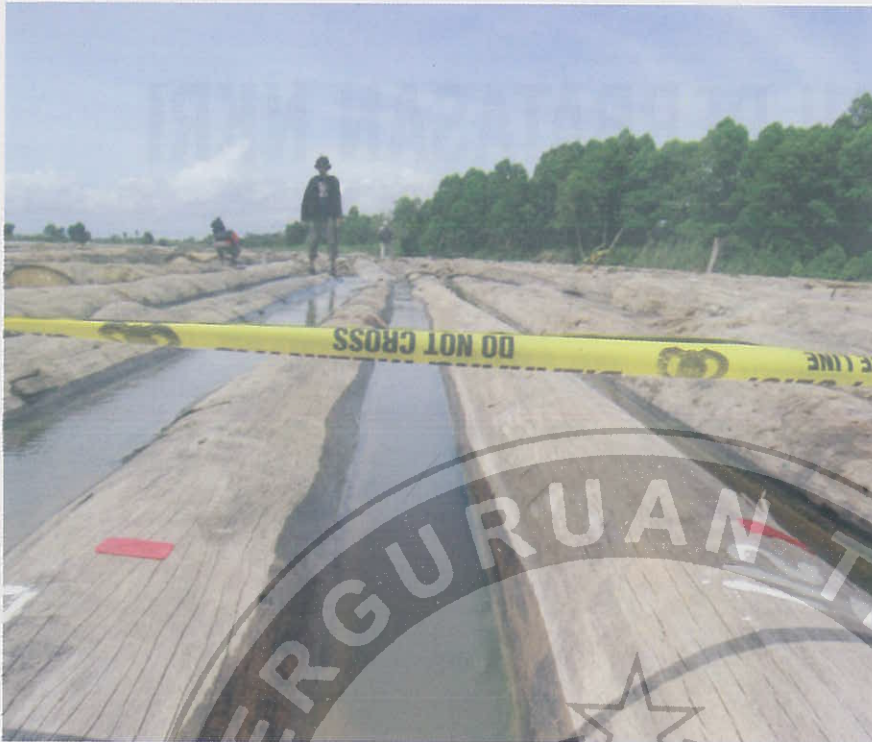
a. Aspek Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan dilakukan untuk menentukan prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pokok permasalahan diantaranya adalah: Pertumbuhan sektor pertanian rata-rata pertahun terus menurun; sektor primer terutama pertanian yang diharapkan banyak menampung tenaga kerja, kenyataannya bekerja tidak penuh (pengangguran terselubung); Produktivitas tenaga kerja sektor primer termasuk pertanian yang dapat dianalogikan sebagai upah kotor per tenaga kerja jauh dari kebutuhan minimum; Pertumbuhan sektor jasa yang sangat tinggi, tidak mampu menyerap tenaga kerja dari unskill dari sektor pertanian; Sektor industri, khususnya industri yang berhubungan produktivitas pertanian, yang mampu menyerap tenaga kerja masih tertinggal.

b. Aspek Sosial. Kondisi sosial di proyeksikan melalui jumlah penduduk dan jumlah keluarga serta analisa pendidikan dan kesehatan.

### 1) Jumlah penduduk.

Berdasarkan angka pertumbuhan penduduk yang cukup meningkat dapat dipergunakan sebagai acuan bagi penyediaan sarana dan prasarana wilayah, sumber daya manusia untuk pelayanan serta penggunaan lahan.





2) Jumlah keluarga.

Berdasarkan perkembangan jumlah keluarga setiap tahunnya yang cukup meningkat dapat di pergunakan sebagai acuan bagi penyediaan sarana dan prasarana wilayah, sumber daya manusia untuk pelayanan serta penggunaan lahan.

3) Kebutuhan pendidikan.

Standar penyediaan sarana pendidikan masih kurang memadai pada setiap SD, SMP dan SMA/SMK.

4) Kebutuhan Kesehatan.

Standar penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dirasakan belum sesuai dengan harapan seperti tenaga medis dan program kesehatan itu sendiri masih kurang memadai.

5) Fasilitas Perumahan dan Pemukiman.

Pembangunan fasilitas perumahan dan pemukiman meliputi pengembangan perumahan, air bersih, limbah dan persampahan serta perkembangan jaringan listrik dan telekomunikasi masih belum mencukupi.

Masalah sosial di wilayah perbatasan semakin menjadi perhatian serius pemerintah, baik daerah maupun pusat. Selain permasalahan batas wilayah yang dikaitkan dengan adanya ancaman yang datang dari luar wilayah masing-masing negara, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari masalah sosial masyarakat di daerah perbatasan serta dengan kondisi sum-

ber daya alam yang semakin terbatas dan meningkatnya kompetisi ditingkat kawasan serta global, hal yang sensitif dan mudah menimbulkan perselisihan (disputes) maupun konflik. Akibat dari permasalahan tersebut jika tidak cepat ditangani oleh pemerintah maka akan dapat menimbulkan konflik baik dari dalam maupun adanya intervensi pihak luar dengan menyebarkan opini-opini yang dapat mempengaruhi masyarakat di wilayah perbatasan.

Dari uraian diatas, maka akan berakibat kepada melemahnya Ketahanan Sosial masyarakat di wilayah perbatasan NKRI dengan permasalahan sebagai berikut :

a. Kondisi masyarakat:

1) Penghayatan masyarakat terhadap Pancasila akan menurun dan berakibat mudahnya memasukkan faham-faham dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pihak lawan dalam menggalang kekuatan sosial.

2) Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata dan adanya beberapa kebutuhan masyarakat yang berasal dari luar (negara tetangga, seperti di Provinsi Kalbar dan Kaltim yang lebih dominan memerlukan kebutuhan pokok dari Malaysia) sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup tinggi antara masyarakat WNI di wilayah

perbatasan dengan masyarakat Malaysia diperbatasan yang berseberangan.

3) Tingkat pendidikan masyarakat di daerah perbatasan relatif masih rendah dan tertinggal sehingga mudah dipengaruhi oleh budaya negara tetangga yang dapat melemahkan Ketahanan Sosial masyarakat.

b. Kondisi hukum:

1) Illegal logging. Masih terdapat adanya upaya penyelundupan kayu (Illegal logging) ke negara tetangga baik melalui jalan utama (pos Libas) maupun jalan tikus. Hal ini dilakukan dengan mengatas namakan asosiasi masyarakat setempat maupun masyarakat secara perorangan. Penyelundupan kayu ke luar ini dilakukan, dikarenakan penjualan dapat dilakukan dengan cepat dan pembeli selalu siap menerima kayu setiap saat dengan harga yang lebih tinggi.

2) Illegal trading (penyelundupan). Masih banyak ditemukan adanya pengiriman pupuk bersubsidi ke negara tetangga dengan harga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga di dalam negeri termasuk masuknya barang-barang illegal ke wilayah Indonesia khususnya sembako seperti gula yang harganya lebih murah dibanding produk lokal, demikian juga barang-barang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan.

3) Illegal trafficking (pelintas batas). Adanya hubungan keluarga / persaudaraan yang kuat antara masyarakat perbatasan yang berada diwilayah Indonesia dengan masyarakat yang berada di wilayah negara tetangga. Hal ini dikarenakan kedua kelompok masyarakat tersebut masih terdiri dari satu suku dengan budaya yang dilakukan bersama-sama. Dengan adanya kegiatan ini mengakibatkan banyaknya jalan setapak / jalan tikus disepanjang perbatasan yang memberikan kerawanan terhadap pengamanan perbatasan.

4) Private Farming (pertanian lintas negara). Adanya perkebunan penduduk kedua wilayah yang telah melewati garis perbatasan. Hal ini menyebabkan adanya kegiatan keluar masuk perbatasan sehingga ikut mempengaruhi pengawasan perbatasan. Wilayah perkebunan ini pada beberapa wilayah masih di klaim tidak melewati perbatasan. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya Private Farming ini adalah terjadinya pergeseran patok perbatasan secara



sengaja maupun tidak sengaja.

Sengketa wilayah perbatasan dapat menjadi sumber potensi ancaman pertahanan yang berimplikasi pada Ketahanan Sosial masyarakat, persoalan perbatasan yang belum tuntas tersebut diantaranya mengenai pelintas batas, penyelundupan, tapal batas dan persoalan lainnya perlu dilakukan upaya penanganan yang serius sehingga tidak menimbulkan polemik dimasa mendatang. Maka perlu ditetapkan suatu kebijakan dan strategi yang ditindak lanjuti melalui upaya konkrit dalam meningkatkan Ketahanan Sosial masyarakat di wilayah perbatasan NKRI untuk mencapai sasaran yang diinginkan yaitu terciptanya kesejahteraan dan keamanan di wilayah perbatasan. Adapun kebijakan yang ditetapkan adalah Revitalisasi sosio ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Sehingga menjadi penting dalam keterlibatan seluruh komponen bangsa di wilayah dalam menjabarkan kebijakan tersebut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing komponen bangsa. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. TNI.

Sesuai dengan dengan amanat UU RI No 34/2004 bahwa salah satu tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah melaksanakan Pemberdayaan Wilayah, dalam hal ini juga dikorelasikan dengan tugas yang lain yaitu mengmana-

kan wilayah perbatasan negara.

Pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan melalui pembinaan oleh satuan kewilayahan yang pada waktu lalu lebih dikenal dengan Komando Teritorial (Koter). Pada hakekatnya Pemberdayaan Wilayah Pertahanan itu sendiri sama dengan Pembinaan Teritorial, yaitu suatu upaya, pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus melalui pembinaan terhadap sumber daya nasional (geografi, demografi dan kondisi sosial) ditransformasikan menjadi ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk Pertahanan Negara. Adapun Pembinaan Teritorial oleh TNI dalam lingkup Ketahanan Sosial, dilakukan oleh aparat teritorial yang selalu memonitor dan melakukan pembinaan di wilayahnya. Sehingga setiap permasalahan yang timbul akan selalu diketahui secara dini. Kemampuan yang harus dimiliki adalah kepemimpinan, tingkat pendidikan, kemampuan mental dan ideologi, kemampuan fisik, kemampuan profesionalisme dan kemampuan penguasaan 5 (lima) kemampuan teritorial yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Temu cepat dan lapor cepat.

Kemampuan yang dapat menyelenggarakan penginderaan terhadap lingkungan sehingga setiap perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dapat diketahui sedini mungkin.

2) Manajemen teritorial. Kemampuan yang dapat mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat

yang mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, gama dan psikologi untuk menemukan hal-hal yang kemungkinan dapat menimbulkan gejolak dan mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap keadaan serta mampu mengambil tindakan pencegahan dalam rangka memelihara Stabilitas Wilayah.

3) Penguasaan wilayah. Dapat mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, gama dan psikologi untuk dapat menentukan hal-hal yang dapat menghambat jalannya pembangunan dan ikut serta dalam menggerakkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah sesuai kapasitas tugasnya.

4) Pembinaan Rakyat Terlatih.

Kemampuan yang dapat membina dan memproyeksikan segenap potensi wilayah beserta rakyatnya dalam rangka menyelenggarakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

5) Komunikasi sosial.

Kemampuan komunikasi sosial diharapkan mampu menterjemahkan program pembangunan nasional maupun daerah dengan bahasa yang sederhana serta dapat menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan wilayah.

b. Polri.

Sesuai dengan amanat UU RI No 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka tugas Polri diantaranya adalah melaksanakan penegakkan hukum dan bertanggung jawab terhadap Keamanan dan Ketertiban masyarakat termasuk bertanggung jawab terhadap Keamanan Dalam Negeri. Maka dalam upaya membangun Ketahanan Sosial di wilayah perbatasan Polri melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1) Bersama-sama dengan institusi penegak hukum lainnya melaksanakan operasi pengakkan hukum terhadap pelanggaran di wilayah perbatasan secara tuntas.

2) Memberdayakan tugas-tugas Kepolisian Masyarakat (Polmas) sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan tindak kriminalitas lainnya di wilayah perbatasan yang dapat menimbulkan konflik antar negara.

3) Melaksanakan sosialisasi hukum terhadap masyarakat di wilayah perbatasan agar tidak terjadi pelang-





garan hukum yang dapat menghambat terbangunnya Ketahanan Sosial Masyarakat di wilayah perbatasan.

4) Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang negatif.

c. Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat UU RI No 32/2004 dan UU RI No 12/2008 tentang Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki semangat untuk melaksanakan percepatan pembangunan daerahnya, dengan tujuan pembangunan masyarakat menuju sejahtera dan berkeadilan segera dapat diwujudkan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan Ketahanan Sosial dalam rangka pembinaan wilayah, maka pemerintah dipandang perlu melakukan upaya-upaya pembinaan dalam peningkatan pembangunan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1) Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui peningkatan kesempatan berpendidikan bagi masyarakat baik yang di kota maupun di desa dengan meningkatkan fasilitas pelayanan pendidikan baik jumlah, kualitas terutama penyebarannya, namun perluasan kesempatan belajar harus di ikuti pula dengan relevansi jenis dan jenjang pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat. Melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pola hidup sehat, pemerataan pelayanan kesehatan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas gizi masyarakat yang tiap tahun melanda wilayah perbatasan dan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia.

3) Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal. Melalui peningkatan kesejahteraan penduduk yang saat ini cukup memprihatinkan akibat masih tingginya angka kemiskinan dan disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita, meningkatnya angka pengangguran, belum berkembangnya sektor riil serta rendahnya pertumbuhan dan produktivitas UKM dan Koperasi, untuk itu perekonomian di wilayah perbatasan saat ini masih mengandalkan sektor-sektor tradisional harus juga memperhatikan sektor-sektor non tradisional seperti industri juga tersier khususnya jasa-jasa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

4) Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perekonomian, sangat

bergantung pada kelayakan infrastruktur pembangunan yang ada. Untuk itu pemerintah akan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur baik dalam jumlah, kualitas serta penyebarannya terutama sarana dan prasarana air dan listrik, transportasi perumahan dan pemukiman.

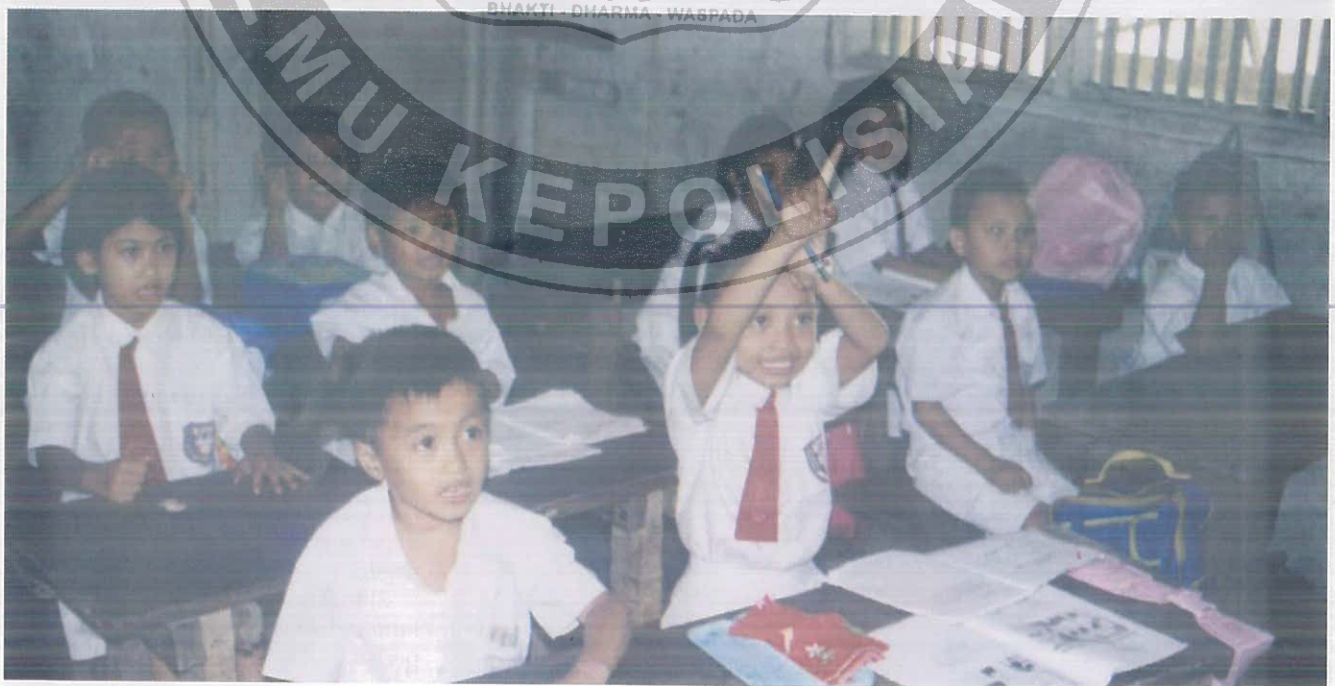
5) Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam rangka menjelmakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum. Melalui penataan dan pembinaan hukum tingkat daerah serta pemerintah ingin menempatkan supremasi hukum sebagai landasan pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan mengedepankan norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat.

6) Meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.

Melalui penanganan masalah penataan ruang yang merupakan salah satu mata rantai dalam perencanaan pembangunan daerah, serta masalah lingkungan hidup yang erat kaitannya dalam mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari.

7) Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kawasan perbatasan.

Melalui percepatan penanggulangan masalah yang mendasar pada masyarakat di perbatasan yakni masalah kemiskinan dengan seju-







gap sebagai obat keras, bukan obat berbahaya sehingga masyarakat tidak takut melakukan transaksi. Di pasaran harga jualnya pun sangat murah, yakni Rp 100 per kilogram sementara di negara lain, termasuk Indonesia Rp 50 juta per kilogramnya, bahkan pernah mencapai Rp 2 miliar! "Ini lahan bisnis, yang menggiurkan, bukan sekedar kejahatan," terang Gories Mere.

Gories menambahkan, hukum yang diterapkan di Indonesia bila kedapatan memiliki opium sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 -- pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Narkotika -- adalah hukuman mati.

#### INDONESIA NOMOR WAHID

Sementara itu, berkaitan dengan tingkat peredaran dan penggunaan narkoba di wilayah Asia Timur Jauh selama lima tahun terakhir menurut catatan IDEC, seperti dijelaskan Deputi Kerja Sama dan Hukum BNN Brigjen Pol Indradi Thanos, Indonesia berada di urutan "nomor wahid". Posisi ini sangat masuk akal bila dihitung dari jumlah penduduk yang mengkonsumsi dan data ungkap yang dilakukan aparat kepolisian.

"Tentu ini data yang sangat memprihatinkan," tandas mantan Kapolda Kepri ini seraya mengatakan itulah pentingnya forum IDEC bagi Indonesia, khususnya Polri, untuk saling bertukar informasi dan teknik dalam

melakukan penangkapan terhadap sindikat narkoba secara bersama-sama sesuai kesepakatan bersama.

Kesepakatan tersebut misalnya dalam hal mengejar jaringan yang dijadikan target operasi (TO) negara anggota FER yang sudah bergerak dari satu negara ke negara lainnya. Semisal ada TO dari Australia bersembunyi di Indonesia atau negara lainnya yang tergabung dalam FER, maka negara yang dijadikan tempat persembunyain TO tersebut harus memberikan informasi keberadaannya pada negara asal TO, membantu pengejaran dan bahkan melakukan penangkapan. "TO tersebut bisa diproses sesuai aturan hukum di negara TO itu tertangkap," jelas Indradi Thanos.

Sementara itu, Direktur IV Narkoba Mabes Polri Brigjen Pol Arman Depari menambahkan, pengguna narkoba di Indonesia prosentasenya sama dengan Iran. "Prosentase penduduk yang menggunakan narkoba sama-sama 3-4 persen," jelas Arman Depari.

Bicara tentang sejarah pembentukan, IDEC berdiri tahun 1983 dan beranggotakan 70 negara dimana keanggotaannya dibagi dalam "Kelompok Kerja (Working Group) berdasarkan kawasan atau region, yaitu : Southern Cone Region; Andean Region; Mexico/Central Amerika Region; Carribean Region; Far East Region; Europe/Africa/Middle East Region dan Southwest/Central Asia Region. Indonesia sendiri mulai bergabung dan berperan aktif sejak tahun 2004 sebagai pengamat (observer). Baru pada pertemuan IDEC di Montreal Kanada tahun 2006, Indonesia resmi masuk dalam kelompok kerja Far East Region. [JT 02]

